

Demokratisasi Pendidikan Di Bawah Praktik Otoritarianisme: Analisis Filsafat Pendidikan Islam Terhadap Praktik Kekuasaan Dalam Dunia Pendidikan

Muhammad Zakki Musyafa¹, Abdul Khobir², Taufiqoh Khasanah³, Zamrudin Ruwais⁴

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: muhammad.zakki.musyafa24062@mhs.uingusdur.ac.id,
abdul.khobir@uingusdur.ac.id, taufiqoh.khasanah24070@mhs.uingusdur.ac.id,
zamrudin.ruwais24051@mhs.uingusdur.ac.id

Article received: 28 September 2025, Review process: 12 Oktober 2025,

Article Accepted: 22 November, Article published: 20 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines krisis demokratisasi pendidikan di Indonesia still dominated by authoritarian practices, such as sentralisasi kebijakan yang ketat, teacher dominance in the learning process, and limited dialogue space for students. Although the kebijakan Merdeka Belajar has been introduced as a reform effort, its implementation has not yet touched the philosophical and cultural dimensions that form the core of educational liberation. Using a qualitative approach with philosophical-critical analysis, this study explores three fundamental values in Islamic educational philosophy: hurriyah al-fikr (freedom of thought), syura (consultation), and adl (justice). These three values serve as the foundation for building a more democratic, participatory, and inclusive education system. The findings indicate that these values are highly relevant for critiquing power relations in education while offering a humanistic, dialogical, and transformative learning model. This study contributes by shifting the paradigm of Islamic educational philosophy from a normative approach toward a critical-transformative approach, thereby strengthening the implementation of Merdeka Belajar as a real movement for student liberation and empowerment.

Keywords: Educational Democratization, Islamic Educational Philosophy, Freedom to Lear.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji krisis demokratisasi pendidikan di Indonesia yang masih dikuasai oleh praktik otoritarian, seperti sentralisasi kebijakan yang ketat, dominasi guru dalam proses pembelajaran, serta minimnya ruang dialog bagi peserta didik. Meskipun kebijakan Merdeka Belajar sudah diperkenalkan sebagai upaya reformasi, pelaksanaannya belum menyentuh dimensi filosofis dan kultural yang menjadi inti pembebasan pendidikan. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis filosofis-kritis, penelitian ini menelaah tiga nilai fundamental dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu hurriyah al-fikr (kebebasan berpikir), syura (musyawarah), dan adl (keadilan). Ketiga nilai tersebut dijadikan landasan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih demokratis, partisipatif, dan inklusif. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai ini sangat relevan untuk mengkritisi relasi kuasa dalam dunia pendidikan sekaligus menawarkan model pembelajaran yang humanis, dialogis,

dan transformatif. Temuan ini memberikan kontribusi penting dengan menggeser paradigma filsafat pendidikan Islam dari pendekatan normatif ke arah kritis-transformatif, sehingga dapat memperkuat implementasi Merdeka Belajar sebagai gerakan yang nyata dalam pembebasan dan pemberdayaan peserta didik.

Kata Kunci: Demokratisasi Pendidikan, Filsafat Pendidikan Islam, Merdeka Belajar.

PENDAHULUAN

Demokratisasi pendidikan, seperti yang diartikulasikan oleh Paulo Freire dan John Dewey, menekankan peran pendidikan dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan. Kedua ahli teori menganjurkan kerangka pendidikan yang mempromosikan pemikiran kritis, dialog, dan partisipasi aktif, melihat sekolah sebagai ruang penting untuk transformasi sosial dan keterlibatan demokratis. Freire menekankan pedagogi kritis untuk pemberdayaan dan keadilan sosial, sementara Dewey menganjurkan pembelajaran pengalaman dan partisipasi demokratis dalam pendidikan. Kedua ahli teori menekankan pentingnya pendidikan dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dan mempromosikan kewarganegaraan aktif di antara peserta didik. (Riddle, 2024). Inti dari pendekatan Freire adalah menganjurkan proses pendidikan yang dialogis dan partisipatif, yang secara fundamental menantang model transmisi pengetahuan semata. Freire berpendapat secara eksplisit bahwa pendidikan harus memfasilitasi humanisasi melalui refleksi dan tindakan kritis dan dialogis, bergerak melampaui transmisi pengetahuan belaka. Lebih lanjut, konsep ini menekankan kebajikan demokratik, seperti kerendahan hati, keterbukaan, dan toleransi, yang dianggapnya krusial untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar demokratis dan memberdayakan (Xu, 2023).

Visi Freire ini telah memberikan dampak signifikan terhadap reformasi pendidikan, khususnya di Brasil. Masa jabatannya sebagai sekretaris pendidikan di São Paulo menjadi implementasi nyata dari gagasannya. Selama periode ini, fokus utamanya adalah demokratisasi konten pendidikan dan struktur administrasi, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara substantif dalam sistem pendidikan (Mayo, 2004). Upaya ini menegaskan pandangannya bahwa sekolah harus berfungsi sebagai situs demokratisasi radikal.

Selain demokratisasi struktural, reformasi tersebut secara eksplisit mencakup program pemberdayaan guru. Inisiatif ini melibatkan peningkatan kondisi kerja pendidik dan mempromosikan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan, yang dianggap Freire sangat penting untuk menumbuhkan etos demokrasi di dalam lembaga pendidikan itu sendiri (Mayo, 2004). Pemberdayaan ini memastikan para pendidik adalah agen yang kompeten untuk menerapkan praktik pedagogi partisipatif dan dialogis. Secara keseluruhan, kontribusi Freire meletakkan dasar bagi filosofi pendidikan yang secara inheren terkait dengan proyek politik pembebasan, di mana refleksi kritis dan tindakan transformatif membentuk warga negara yang mampu mengubah realitas mereka menuju masyarakat yang lebih adil.

Kajian akademik terkini secara konsisten menggarisbawahi urgensi isu relasi antara pendidikan Islam dan kekuasaan dalam konteks riset pendidikan di

Indonesia. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa fokus utama penelitian terdahulu masih berkisar pada dimensi kebijakan dan politik pendidikan, alih-alih pada eksplorasi akar filosofis yang mendalam.

Secara spesifik, studi oleh Hidayati et al. (2025) mengungkap bahwa implementasi pendidikan Islam dalam kerangka Kurikulum Merdeka masih didominasi oleh paradigma konservatif yang cenderung membatasi kebebasan berpikir. Dengan menggunakan lensa kritis, penelitian tersebut berupaya merumuskan pendidikan Islam yang lebih kontekstual dan partisipatif.

Kontribusi lain datang dari Khoirul Ulum (2023) yang mendeskripsikan secara deskriptif kebijakan pendidikan agama Islam (PAI) pascareformasi sebagai basis pengembangan pendidikan Islam ke depan, khususnya dalam rangka pembentukan “generasi emas”. Namun, fokus ini dinilai masih bersifat deskriptif-normatif dan belum menyentuh dimensi filosofis yang lebih substansial.

Selanjutnya, hasil riset Putri et al. (2025) memperjelas bahwa proses formulasi kebijakan pendidikan seringkali diintervensi oleh aktor-aktor politik dan struktur kekuasaan tertentu. Temuan ini mengafirmasi bahwa arena pendidikan tidak steril dari kepentingan ideologis, melainkan menjadi medan kontestasi kekuatan sosial-politik.

Senada dengan itu, Munah et al. (2022) mendeskripsikan bahwa kebijakan politik pascareformasi terhadap lembaga pendidikan Islam secara faktual masih mencerminkan pola ketergantungan (dependensi) terhadap sistem politik nasional. Keempat penelitian tersebut secara kolektif menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari jeratan struktur kekuasaan yang cenderung sentralistik dan hegemonik.

Dengan demikian, sintesis dari kajian-kajian di atas menunjukkan adanya celah riset (research gap) yang signifikan: Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek empiris kebijakan dan politik pendidikan Islam, sementara mengabaikan pendalaman filosofis yang esensial sebagai basis kritik terhadap praktik pendidikan yang otoritarian.

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan pengembangan filsafat pendidikan Islam yang bersifat kritis-transformatif. Kerangka filosofis ini diharapkan dapat menjadi landasan teoritis yang kokoh bagi perwujudan sistem pendidikan Islam yang bercirikan demokratis dan humanis.

Artikel yang dikirimkan merupakan karya asli penulis yang bebas dari plagiarisme, dan belum pernah dipublikasikan di jurnal atau buku ilmiah lainnya. Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ini harus sesuai dengan format artikel yang menjadi gaya selingkung jurnal ini. Ditulis dengan menggunakan huruf Book Antiqua 12, dengan spasi tunggal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis secara sistematis untuk memperoleh pemahaman

mendalam mengenai topik yang dikaji, sebagaimana dijelaskan oleh Zed (2008) dan Bowen (2009). Pendekatan penelitian bersifat kritis-transformatif karena penelitian bertujuan mengembangkan kerangka filsafat pendidikan Islam yang mampu mengkritisi struktur kekuasaan dan menawarkan paradigma pendidikan yang demokratis. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada panduan desain penelitian kualitatif yang dirumuskan Creswell (2014). Seluruh proses penelitian tidak melibatkan observasi lapangan dan sepenuhnya berbasis analisis literatur. Objek kajian dalam penelitian ini adalah literatur ilmiah yang berkaitan dengan tema demokratisasi pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Sumber data mencakup karya primer Paulo Freire dan John Dewey, artikel jurnal nasional maupun internasional, buku akademik, serta laporan penelitian dan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Penggunaan dokumen dan literatur sebagai sumber utama sejalan dengan pemahaman bahwa dokumen adalah data yang valid untuk penelitian kualitatif (Bowen, 2009). Secara kuantitatif, penelitian ini menganalisis sekitar dua puluh hingga tiga puluh literatur yang mencerminkan keberagaman wacana teoretis dan empiris. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan empat kriteria utama yaitu reputasi sumber, relevansi tema, kebaruan, dan kelayakan akademik. Kriteria ini sejalan dengan standar penilaian literatur ilmiah sebagaimana dianjurkan Creswell (2014). Reputasi sumber mempertimbangkan jurnal terindeks internasional dan nasional terakreditasi, serta buku akademik dari penerbit bereputasi. Relevansi difokuskan pada keterkaitan literatur dengan tema demokratisasi pendidikan, pedagogi kritis, serta pendidikan Islam di Indonesia. Kebaruan diberi prioritas pada publikasi sepuluh tahun terakhir, sementara karya klasik tetap digunakan sebagai dasar teori. Kelayakan akademik dievaluasi berdasarkan kejelasan metodologi, argumentasi, dan kontribusi ilmiah dari masing-masing literatur.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap dokumen dan literatur menggunakan basis data seperti Google Scholar, DOAJ, Scopus, dan perpustakaan universitas. Prosedur ini mengikuti langkah penelitian kepustakaan yang dijelaskan oleh Zed (2008). Tahapan pengumpulan meliputi identifikasi sumber, pencatatan bibliografi, pembacaan mendalam, serta pencatatan kutipan dan gagasan utama dari setiap literatur. Teknik ini sejalan dengan praktik analisis dokumen menurut Bowen (2009). Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis kritis-filosofis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema dan pola pemikiran dalam literatur, sesuai dengan prosedur analisis isi menurut Krippendorff (2013) dan Elo & Kyngäs (2008). Tahapan analisis meliputi reduksi data, klasifikasi tema, dan kategorisasi sesuai model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Analisis kritis dilakukan dengan membandingkan dan merekonstruksi gagasan teoretis dengan temuan empiris sehingga menghasilkan sintesis filsafat pendidikan Islam yang kritis-transformatif. Seluruh proses analisis dilakukan melalui penalaran argumentatif untuk memastikan koherensi dan ketepatan interpretasi. Dalam penelitian kepustakaan, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan seleksi sumber, interpretasi teks, dan konstruksi teoritis. Posisi peneliti dalam penelitian kualitatif

sebagai instrumen utama telah ditegaskan dalam karya-karya metodologi oleh Denzin dan Lincoln (2011). Validasi internal dilakukan melalui triangulasi literatur dan refleksi berkelanjutan terhadap asumsi teoretis yang digunakan, sejalan dengan panduan validasi dalam penelitian kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik pendidikan di Indonesia masih didominasi oleh pola hubungan hierarkis antara guru dan peserta didik. Proses pembelajaran berlangsung secara satu arah, di mana guru menjadi pusat otoritas dan pengambil keputusan utama terkait materi, metode, serta evaluasi pembelajaran. Kondisi ini menjadikan peserta didik berperan pasif dan kurang memiliki ruang untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses belajar.

Temuan lain memperlihatkan bahwa model pendidikan otoriter masih bertahan di berbagai wilayah, khususnya di sekolah-sekolah yang belum mendapatkan dukungan memadai dalam penerapan kebijakan pendidikan yang lebih progresif. Pola kontrol guru yang kuat, minimnya ruang dialog, dan ketidakmampuan sekolah untuk mengadopsi pendekatan partisipatif menjadi penghalang utama terwujudnya pembelajaran yang demokratis.

Di sisi lain, implementasi kebijakan Merdeka Belajar menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif dengan praktik lapangan. Banyak sekolah belum mampu menerapkan prinsip kemandirian belajar karena keterbatasan sumber daya, kultur sekolah yang masih birokratis, serta rendahnya kapasitas pendidik dalam mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Akibatnya, transformasi pendidikan berjalan lambat dan belum menyentuh aspek filosofis maupun kultural yang diperlukan.

Secara keseluruhan, kajian ini menemukan bahwa upaya menuju pendidikan yang lebih humanis dan demokratis belum berjalan optimal. Dominasi guru dalam proses pembelajaran, kuatnya pola pendidikan otoriter, dan lemahnya penerapan kebijakan Merdeka Belajar menjadi faktor yang menghambat perubahan. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan pendidikan yang mengedepankan dialog, partisipasi, serta pembebasan sebagai dasar untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan manusiawi. Temuan yang telah dipaparkan memberikan dasar untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang melandasi persoalan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan meninjau hasil penelitian ini melalui perspektif teoritis dan literatur terkait.

Krisis Demokratisasi dan Dominasi Pendidikan Otoritarian di Indonesia

Lanskap pendidikan di Indonesia terus mencerminkan pendekatan yang berpusat pada guru, di mana pendidik mendominasi proses pembelajaran, menurunkan siswa ke peran pasif. Situasi ini sejalan dengan kritik Paulo Freire terhadap model pendidikan “perbankan”, yang memandang siswa sebagai wadah kosong yang harus diisi dengan pengetahuan. Meskipun diperkenalkannya kebijakan “Merdeka Belajar” yang bertujuan mendorong partisipasi aktif, praktik

pendidikan tradisional yang mengakar masih berlaku, membatasi realisasi otonomi pelajar sejati.

Salah satu bentuknya adalah Intruksi yang berpusat pada guru, dimana guru menjadi sentral dalam semua keputusan terkait kurikulum. Hal ini menunjukkan ketidakterlibatan siswa. Padahal siswa juga pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Siswa sering merupakan penerima pasif, kurang kontrol atas proses belajar mereka.

Model ini melanggengkan ketidakseimbangan kekuatan, di mana guru dipandang sebagai satu-satunya otoritas. Freire menganjurkan pendidikan yang menimbulkan masalah yang mendorong pemikiran kritis dan dialog. Dalam pandangan Freire guru adalah fasilitator, inisiator dimana guru menjadi pemantik dalam setiap diskusi. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian siswa menjawab. Guru tidak langsung membenarkan namun memberikan ruang diskusi bagi siswa lain sehingga model pendidikan seperti inilah yang menumbuhkan jiwa kritis. Dia menekankan perlunya pendidikan menjadi proses pembebasan, mendorong keadilan sosial dan humanisasi.

Model perbankan dikritik karena merendahkan siswa dan mencekik potensi mereka (Siri et al., 2024). Guru akan seperti diktator yang otoriter menjadikan siswa sebagai objek pendidikan. Tidak memberikan ruang sama sekali bagi siswa untuk mengekspresikan diri dan mengeksplorasi dunianya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, meskipun Indonesia sudah menginisiasi kurikulum Merdeka Belajar yang diharapkan mampu untuk merubah arah pendidikan agar lebih humanis pada realitanya masih jauh dari harapan itu.

Pelaksanaan kurikulum “Merdeka Belajar” tidak konsisten, terutama di daerah terpinggiran (Siri et al., 2024). Tentu masalah yang akan ada adalah konsistensi. Daerah 3T belum tentu mampu untuk melaksanakan Merdeka Belajar karena masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan tradisional. Selain itu Kesenjangan dalam kualitas pendidikan tetap ada, merusak efektivitas kebijakan (Siri et al., 2024). Banyak pendidik masih mematuhi praktik tradisional, membatasi pergeseran yang dimaksudkan menuju pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sementara inisiatif “Merdeka Belajar” bertujuan untuk mengubah pendidikan di Indonesia, praktik-praktik tradisional yang berpusat pada guru menunjukkan bahwa tantangan yang signifikan tetap ada. Transisi ke kerangka pendidikan yang lebih membebaskan, seperti yang dibayangkan oleh Freire, membutuhkan upaya bersama untuk memberdayakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran.

Kritik terhadap pendidikan otoriter menyoroti efek merugikan pada nilai-nilai demokrasi, pemikiran kritis, dan kesetaraan sosial. Sistem pendidikan otoriter sering memprioritaskan kontrol dan kesesuaian atas kreativitas dan penyelidikan, yang mengarah ke generasi siswa yang mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk partisipasi demokratis. Tinjauan ini akan mengeksplorasi karakteristik, implikasi, dan kritik pendidikan otoriter.

Salah satu karakteristik pendidikan adalah kontrol sosial yaitu pendidikan di bawah rezim otoriter sering bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan menekan perbedaan pendapat, memprioritaskan kepatuhan daripada keterlibatan

kritis(Paglayan, 2025). Selain itu adanya isi kurikulum: yang biasanya dirancang untuk mempromosikan ideologi negara, membatasi paparan terhadap beragam perspektif dan pemikiran kritis(Paglayan, 2025).

Pemantauan Guru: Pengawasan ketat terhadap pendidik memastikan kepatuhan terhadap tujuan otoriter, menghambat metode pengajaran inovatif(Paglayan, 2025).Setidaknya ada tiga karakteristik pendidikan otoriter diantaranya; a). Kontrol Sosial yaitu Pendidikan di bawah rezim otoriter sering bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan menekan perbedaan pendapat, memprioritaskan kepatuhan daripada keterlibatan kritis. Pendidikan cenderung menjadi alat untuk menumbuhkan sikap patuh buta dimana peraturan-peraturan yang diatasnamakan ketertiban kadangkala membunuh daya kritis siswa. Padahal peraturan harus disepakati bersama agar tidak ada yang dirugikan dan lebih humanis. b). Isi Kurikulum dimana kurikulum biasanya dirancang untuk mempromosikan ideologi negara, membatasi paparan terhadap beragam perspektif dan pemikiran kritis. Kenyataan yang sangat pahit adalah ketika siswa mulai mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah maka di cap sebagai anak nakal. Padahal berpikir kritis adalah salah satu ciri negara maju. c).Pemantauan Guru: Pengawasan ketat terhadap pendidik memastikan kepatuhan terhadap tujuan otoriter, menghambat metode pengajaran inovatif. Pendidikan bukan hanya tentang patuh pada sistem yang semakin menjadikan siswa sebagai robot. Dikendalikan oleh guru. Pendidikan memang mengajarkan kepatuhan tapi itu bukan esensi pendidikan. Pendidikan yang baik adalah ketika pendidik dan pembelajar dapat bersinergi bersama menciptakan inovasi-inovasi untuk memecahkan masalah yang ada.

Pendidikan otoriter juga berimplikasi pada masyarakat yaitu penahanan kognitif: Pendidikan otoriter dapat menyebabkan “penahanan kognitif” siswa, di mana pemikiran kritis ditekan, dan konformitas dihargai. Ketika ada siswa bertanya tentang hal-hal yang rumit jika tidak disebut kritis, kadang guru membungkam pertanyaan tersebut dengan dalih sudah itu bukan urusan kita. Hal ini menjadikan daya kritis semakin terancam. Selain itu terdapat eksploitasi krisis yaitu ketika krisis ekonomi dan sistemik sering memperburuk kecenderungan otoriter dalam pendidikan, karena para pemimpin mengeksploitasi rasa takut untuk membenarkan tindakan pengendali. Tambahkan dengan kerapuhan nilai demokratik: artinya ketergantungan pada praktik pendidikan otoriter dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi, karena siswa mungkin terbiasa menerima otoritas tanpa pertanyaan (Coulter & Herman, 2020).

Sementara pendidikan otoriter menimbulkan tantangan yang signifikan, penting untuk mengenali potensi pedagogi kritis untuk menangkal efek ini. Dengan membina lingkungan yang mendorong dialog dan pemikiran independen, pendidik dapat mempromosikan keterlibatan demokratis dan melawan kecenderungan otoriter dalam lingkungan pendidikan (Giroux & Filippakou, 2020). John Dewey (1916) menegaskan bahwa pendidikan yang sejati adalah proses pengalaman demokratis. Sekolah harus menjadi miniatur masyarakat yang hidup dari kerja sama dan diskusi. Namun, di Indonesia, kebijakan pendidikan yang

sentralistik dan birokratis seringkali menghambat dinamika tersebut. Dengan demikian, sistem pendidikan kita masih belum sejalan dengan gagasan Dewey maupun Freire tentang pendidikan sebagai pembebasan dan partisipasi.

Filsafat Pendidikan Islam sebagai Kritik Kritis-Transformatif

Pendidikan tidak boleh terhambat oleh praktik otoritarianisme, tetapi harus mampu mengakomodasi keberagaman potensi peserta didik sekaligus membangkitkan kesadaran kritis mereka terhadap realitas sosial yang tidak adil. Paulo Freire menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer teori, melainkan cara membentuk kesadaran kritis-transformatif yang memungkinkan peserta didik memahami dinamika kekuasaan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Seseorang memahami masalah sosial dengan mengidentifikasi persoalan, mengenali faktor penyebab, dan menawarkan solusi. Hal ini membutuhkan kesadaran kritis-transformatif, yaitu tingkat kesadaran tertinggi yang memungkinkan seseorang mengenali realitas secara mendalam dan bertindak aktif untuk perubahan (Rahmawati, 2016).

Mansour Fakih menjelaskan bahwa paradigma pendidikan kritis adalah pendekatan pendidikan yang mendorong adanya refleksi mendalam terhadap ideologi yang dominan dengan tujuan mencapai perubahan sosial. Pendidikan kritis berupaya menyediakan ruang bagi peserta didik untuk secara bebas dan kritis mengenali serta menganalisis semua potensi yang dimilikinya demi mendukung proses transformasi sosial (Rahmawati, 2016). Dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan kritis ini selaras dengan ajaran yang menekankan pentingnya pemahaman dan pengamalan ilmu sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan dan sesama.

Selain itu, pendidikan kritis mendorong peserta didik untuk aktif merespons tantangan zaman secara kreatif dan bijaksana, sehingga peran mereka sebagai khalifah di bumi dapat dijalankan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pendidikan kritis penting untuk membentuk manusia sebagai makhluk religius dan sosial sekaligus khalifah yang bertanggung jawab terhadap kemakmuran bumi. (Dawiyatun, n.d.). Filosofi Pendidikan Islam yang bersifat kritis-transformatif memadukan nilai-nilai Islam dengan kemampuan berpikir kritis dan reflektif guna mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Tujuannya adalah membentuk individu muslim yang tidak sekadar menerima ajaran secara pasif, tetapi juga mampu berpikir kritis, melakukan refleksi mendalam, dan mengambil tindakan transformatif dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Filsafat pendidikan Islam kritis-transformatif menekankan:

1) Hurriyah al-Fikr (kebebasan berpikir)

Hurriyah al-fikr (kebebasan berpikir), mengajarkan pentingnya otonomi intelektual, yaitu kebebasan individu untuk mengemukakan pendapat, berinovasi, dan berpikir secara kritis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kebebasan dalam mengemukakan pendapat hendaknya dimanfaatkan untuk tujuan menyebarkan nilai-nilai kebaikan, bukan untuk menyebarluaskan tindakan kejahatan atau penindasan. Setiap orang diperbolehkan menyampaikan pendapat secara bebas,

dengan syarat tidak melanggar aturan yang mengatur larangan penghujatan, fitnah, penentangan terhadap kebenaran, penghinaan terhadap keyakinan orang lain, atau kepentingan pribadi semata. Dalam situasi apa pun, Islam tidak mengizinkan tindakan jahat atau perkataan yang tidak pantas, serta tidak memberi wewenang kepada siapapun untuk menggunakan bahasa kasar atau hinaan atas nama kritik (In'amuzzahidin, 1999).

Prinsip hurriyah al-fikr ini tidak hanya membebaskan individu untuk berpikir dan berpendapat, tetapi juga mendorong proses pembelajaran yang aktif, dialogis, dan kontekstual dalam pendidikan Islam. Melalui kebebasan berpikir yang bertanggung jawab, peserta didik diajak untuk terus mengembangkan kreativitas dan kemampuan analisis kritisnya sehingga mampu memahami serta menghadapi berbagai tantangan zaman dengan wawasan yang luas dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan sikap yang mendukung perubahan positif dan kemajuan masyarakat secara menyeluruh.

2) Syura (musyawarah)

Syura (musyawarah) menekankan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Menurut Khalil Abdul Karim (2003), syura merupakan tradisi asli masyarakat Arab yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun oleh komunitas suku-suku Arab hingga masa kini. Mekanisme syura lahir bukan dimaksudkan untuk mendominasi kepala suku, melainkan sebagai forum penghimpunan gagasan-gagasan unggulan yang diadakan di institusi musyawarah suku. Dalam bahasa Arab, istilah syura sendiri merujuk pada proses penyaringan ide-ide dengan melibatkan sekelompok orang yang dinilai memiliki kecerdasan, kemampuan berargumentasi, pengalaman, kedalaman pemikiran, serta berbagai kualifikasi lain yang memungkinkan mereka memberikan pertimbangan serta keputusan yang tepat dan tegas (Suhaila et al., 2025).

Sebagai tradisi yang mengedepankan partisipasi aktif dan diskusi mendalam, syura sesungguhnya merepresentasikan semangat demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan keadilan. Dalam dunia pendidikan, penerapan prinsip syura dapat berfungsi sebagai alat kritik terhadap praktik otoritarian yang sering muncul dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Syura, dengan prinsip penyaringan ide yang rasional dan inklusif, dapat mendorong terciptanya ruang dialog di mana suara semua pihak dalam pendidikan didengar dan dihargai. Dengan demikian, praktik kekuasaan yang bersifat dominan dapat dikritisi dan diubah menjadi model tata kelola pendidikan yang demokratis dan partisipatif. Prinsip ini memungkinkan pendidikan untuk berkembang sebagai institusi yang tidak sekadar memproduksi pengetahuan, melainkan juga membina keadilan, kebebasan, dan kematangan berpikir kritis dalam komunitas pendidikan.

3) Adl (keadilan)

Pemahaman Al-Ghazali tentang keadilan sebagai keseimbangan antara akal, ghadabiyah (emosi kemarahan), dan syahwiah (nafsu) sangat relevan dalam filsafat pendidikan Islam, terutama ketika dikaji dari perspektif kritik kritis-transformatif (Rahmawati, 2016). Dalam konteks pendidikan, keadilan tidak hanya berarti

pembagian hak dan kewajiban secara adil, tetapi lebih dari itu, yakni terciptanya harmonisasi antara berbagai aspek jiwa manusia yang menjadi fondasi karakter peserta didik. Ketidakeimbangan aspek jiwa ini sering kali menimbulkan praktik pendidikan yang otoriter dan menekan peran akal dan pertimbangan proporsional siswa dalam proses pembelajaran.

Keadilan dalam pendidikan Islam bukan sekadar menjamin akses yang merata, tetapi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menegakkan prinsip penghormatan terhadap martabat setiap individu dalam proses pembelajaran. Dalam konteks demokratisasi pendidikan, sistem pendidikan Islam harus mampu menolak praktik-praktik otoritarian yang cenderung menindas dan memonopoli kekuasaan atas peserta didik. Keadilan pendidikan diwujudkan dengan membangun suasana pluralistik yang memberdayakan, di mana peserta didik diberi ruang bebas untuk mengemukakan pemikiran dan kritisisme tanpa rasa takut. Pendidik sebagai fasilitator reflektif berperan penting dalam mendukung tumbuhnya kesadaran demokratis, melibatkan peserta didik secara aktif dalam dialog multidimensional yang mencakup aspek intelektual, emosional, dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan Islam yang adil menjadi sarana transformasi sosial yang tidak hanya membuka akses secara formal, tetapi juga mendorong pemberdayaan sejati dan penghargaan terhadap perbedaan, sekaligus menolak dominasi kekuasaan otoriter yang melemahkan potensi dan kebebasan peserta didik.

Model Pendidikan Humanis-Demokratis Berbasis Nilai Islam

Pendidikan Islam yang berakar pada nilai-nilai etis dan humanistik menjadi landasan penting dalam menghadirkan model pendidikan yang demokratis dan terbuka. Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu, melainkan menjadi ruang publik yang inklusif untuk menggali dan mendiskusikan berbagai isu yang menyentuh kehidupan sosial, ekonomi, serta politik. Hal ini sejalan dengan perluasan ruang publik yang demokratis sebagaimana digagas dalam artikel tersebut. Dengan memberikan posisi sentral kepada peserta didik, model ini sekaligus menolak praktik pendidikan yang bersifat otoriter serta mengekang kebebasan berpikir, sehingga tercipta iklim pembelajaran yang benar-benar partisipatif dan transformatif (Amin & Haris, 2024).

Pendekatan humanistik yang memandang manusia sebagai individu yang merdeka dan bertanggung jawab juga sejalan dengan kritik filosofis terhadap praktik kekuasaan dalam dunia pendidikan yang masih didominasi pola otoritarianisme. Melalui penekanan pada kebebasan memilih dan tanggung jawab sosial, pendidikan Islam humanistik berusaha membebaskan peserta didik dari dominasi kekuasaan guru atau sistem yang represif, dengan mengedepankan dialog dan pemikiran kritis. Pendekatan ini turut membangun karakter peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berempati serta memiliki komitmen pada keadilan sosial, sebagai implementasi nyata semangat demokratisasi dalam pendidikan (Abidin, n.d.).

Konsep pragmatisme yang menekankan demokrasi dalam proses belajar-mengajar melengkapi model humanis ini dengan memberikan ruang bagi pengalaman peserta didik sebagai dasar pembelajaran. Dengan tidak menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber otoritas, pendekatan ini menantang struktur pendidikan yang masih bersifat hirarkis dan top-down. Penyesuaian materi dan metode belajar sesuai kebutuhan peserta didik serta kebijakan yang responsif terhadap perubahan sosial menjadi kunci dalam mengurangi praktik otoritarianisme yang kerap membatasi kebebasan berpikir dan mengontrol peserta didik secara ketat (Arbayah, 2013).

Pemikiran Ibnu Khaldun memberikan kerangka pendidikan humanis yang matang secara metodologis dan spiritual. Penekanan pada pembelajaran bertahap, kelembutan, dan diskusi kritis bukan hanya merupakan metode praktis tetapi juga upaya membangun relasi pendidikan yang berlandaskan kemanusiaan dan keadilan. Secara filosofis, metode ini mampu menjadi antidot terhadap gaya pengajaran otoriter yang memaksakan materi tanpa memperhatikan kesiapan dan potensi peserta didik. Dengan demikian, model ini sejalan dengan semangat demokratisasi pendidikan yang mengembalikan posisi manusia sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. (Fauzi et al., 2022).

Keseluruhan model pendidikan ini menempatkan peserta didik sebagai subjek yang merdeka dan kritis, sementara guru berperan sebagai fasilitator serta mitra dialog. Hal ini merupakan bentuk konkret implementasi nilai-nilai Islam dalam kerangka demokratisasi pendidikan yang menentang dominasi otoritarianisme. Kurikulum yang berlandaskan partisipasi dan keadilan sosial, serta evaluasi yang mengedepankan perkembangan karakter, menegaskan bahwa tujuan pendidikan tidak hanya aspek akademis, tetapi juga pembentukan kesadaran sosial dan spiritual yang seimbang. Pendekatan ini selaras dengan semangat Merdeka Belajar yang diberi ruh Islam.

Relevansi dengan Kebijakan Merdeka Belajar

Kebijakan *Merdeka Belajar* yang digagas pemerintah pada dasarnya dimaksudkan untuk melepaskan proses pendidikan dari belenggu birokrasi serta standar yang terlalu kaku. Melalui kebijakan ini, diharapkan muncul ruang yang lebih luas bagi tumbuhnya kreativitas, kemandirian, serta partisipasi aktif peserta didik. Meskipun demikian, penerapannya di lapangan masih cenderung terbatas pada ranah administratif dan teknokratis, sehingga belum benar-benar menyentuh dimensi filosofis maupun kultural yang menjadi ruh dari pendidikan itu sendiri.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, filsafat pendidikan Islam dengan pendekatan kritis-transformatif hadir sebagai dasar penting untuk memastikan bahwa semangat *Merdeka Belajar* tidak berhenti sebagai slogan semata, tetapi berkembang menjadi gerakan kultural yang menumbuhkan kesadaran dan pembebasan. Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai utama dalam Islam, seperti *hurriyah al-fikr* (kebebasan berpikir), *syura* (musyawarah), dan *adl* (keadilan), sebagai kekuatan etis dan sosial yang dapat menggerakkan transformasi pendidikan.

Pertama, nilai *hurriyah al-fikr* menegaskan bahwa kebebasan berpikir merupakan hak sekaligus tanggung jawab peserta didik dalam proses menemukan makna hidup dan mengembangkan potensi diri. Kajian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan Islam yang bersifat normatif saja tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan zaman modern; dibutuhkan orientasi yang lebih kritis dan transformatif agar peserta didik tidak sekadar menerima realitas, tetapi juga mampu menafsirkannya secara reflektif serta berperan aktif dalam perubahan sosial (Asyibli et al., 2025). Dengan menanamkan nilai kebebasan berpikir ini, semangat *Merdeka Belajar* dapat melampaui batas reformasi administratif menuju kebebasan intelektual yang nyata dalam kehidupan sekolah.

Kedua, prinsip *syura* atau musyawarah mencerminkan nilai demokrasi dan keterbukaan dalam praktik pendidikan. Tradisi *syura* dalam Islam menuntut adanya ruang dialog antara semua unsur pendidikan guru, peserta didik, orang tua, maupun masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Nasrulloh, 2023) yang menegaskan pentingnya kebebasan berpikir, berpendapat, dan bermusyawarah sebagai ciri utama demokrasi pendidikan Islam.

Oleh sebab itu, penerapan nilai *syura* dalam kebijakan *Merdeka Belajar* akan memperkuat dimensi dialogis serta partisipatif di lingkungan pendidikan.

Ketiga, nilai *adl* atau keadilan menjadi prinsip moral yang menuntun agar pelaksanaan *Merdeka Belajar* tidak hanya berpihak pada sekolah-sekolah unggulan di perkotaan, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah yang kurang terlayani. Dalam perspektif pendidikan Islam, keadilan bukan sekadar pemerataan akses, tetapi juga pemberdayaan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Hasil penelitian (Pahrudin, 2024) menunjukkan bahwa keadilan dalam pendidikan Islam harus tercermin dalam aspek akses, partisipasi, dan hasil pembelajaran. Dengan demikian, penerapan nilai *adl* memastikan bahwa *Merdeka Belajar* berfungsi sebagai sarana pembebasan, bukan memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada.

Dengan mengharmonisasikan ketiga nilai tersebut *hurriyah al-fikr*, *syura*, dan *adl* dalam pelaksanaan kebijakan *Merdeka Belajar*, pendekatan kritis-transformatif berbasis nilai Islam dapat memperkuat esensi kebijakan ini agar tidak hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar menjadi gerakan budaya yang membebaskan dan memanusiakan. Dengan begitu, filsafat pendidikan Islam tidak berhenti sebagai wacana etis di ranah teoretis, tetapi menjelma menjadi praksis sosial yang nyata dalam membentuk tatanan pendidikan yang lebih demokratis, adil, dan humanis.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik pendidikan di Indonesia masih berada dalam bayang-bayang otoritarianisme, ditandai dengan relasi kekuasaan yang timpang, dominasi guru, model pembelajaran yang menekan kebebasan berpikir, serta implementasi Kurikulum Merdeka Belajar yang belum optimal. Kondisi tersebut mencerminkan krisis demokratisasi pendidikan sebagaimana dikritik oleh pemikir seperti John Dewey dan Paulo Freire. Melalui analisis filsafat

pendidikan Islam, penelitian ini menawarkan pendekatan kritis-transformatif yang mengangkat tiga nilai utama: hurriyah al-fikr (kebebasan berpikir), syura (musyawarah), dan adl (keadilan). Ketiga nilai tersebut terbukti mampu menjadi landasan filosofis untuk mengkritisi praktik pendidikan otoriter sekaligus membangun model pendidikan yang lebih humanis dan demokratis. Hasil penelitian menegaskan adanya kebaruan berupa integrasi nilai-nilai dasar pendidikan Islam dalam kerangka pedagogi kritis, sehingga filsafat pendidikan Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat kritik dan transformasi sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam memperkuat arah kebijakan Merdeka Belajar, khususnya dalam mewujudkan pendidikan yang dialogis, partisipatif, dan adil secara substantif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, A. M. (n.d.). *Konsep Pendidikan Humanistik Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam*. 101–115.
- Amin, M., & Haris, A. (2024). *Transformasi Filsafat Pendidikan Islam : Merancang Strategi Inovatif Pendidikan Multikultural Di Era Revolusi Industri 4 . 0 Dan*. 6(2018), 54–65.
- Arbayah. (2013). *Model pembelajaran humanistik*. 13(2), 204–220.
- Asyibli, B., Ibtihal, A. A., & Fauzan, M. F. (2025). *Epistemological Dimensions in Islamic Educational Philosophy : A Critical Analysis*. 6(01), 69–84.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40
- Coulter, X., & Herman, L. (2020). *The lure of autocratic education in a somewhat democratic society*. *American Journal of Education*, 7(4), 331–352. <https://doi.org/10.30958/AJE.7-4-1>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE handbook of qualitative research* (4th ed.). Sage Publications.
- Dawiyatun. (n.d.). *ISLAM DAN PENDIDIKAN KRITIS : Menata Ulang Islam yang Memihak Dawiyatun Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Pendahuluan Kondisi kehidupan global , langsung maupun tidak , berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia secara umum . Pendidikan s*. 27–45.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Macmillan.
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115.
- Fauzi, A., Muhammad, D. H., & Susandi, A. (2022). *JPKD : Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022 Research & Learning in Primary Education Konsep Pendidikan Humanistik Perspektif Ibnu Khaldun*. 4, 149–158.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Seabury Press.

- Giroux, H. A., Filippakou, O., & Ocampo-Torrejón, S. (2021). Pedagogía crítica en la era del autoritarismo: Desafíos y posibilidades. <https://doi.org/10.4067/s0718-50492021000100203>
- Hidayati, A., Purwoko, P., Khadijah, I., & Suherman, U. (2024). Membaca pendidikan Islam dalam lensa madzhab kritis: Kritik terhadap hegemoni kurikulum konservatif di era Kurikulum Merdeka. *Jurnal Erkina*, 12(2), 145–160. <https://jerk.in.org/index.php/jerk.in/article/view/1495>
- In'amuzzahidin, M. (1999). *KONSEP KEBEBASAN DALAM ISLAM*. 35–37.
- Krippendorff, K. (2013). *Content analysis: An introduction to its methodology* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mayo, P. (2004). *Education and democracy: Paulo Freire, social movements and educational reform in Sao Paulo* [Book review]. <https://doi.org/10.1177/1541344603262742>
- Munah, M., Suhaeni, E., Nasrullah, N., & Abdurrohman, A. (2024). Dinamika Islam di Indonesia: Kebijakan politik terhadap lembaga pendidikan Islam pasca kemerdekaan-reformasi. *Rausyan Fikr*, 10(1), 33–48. <https://jurnal.unt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/6058>
- Nasrulloh, L. (2023). *Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. 15(1), 273–289.
- Paglayan, A. (2025). *Education in authoritarian regimes*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198871996.013.47>
- Pahrudin, A. (2024). *Demokrasi Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi*. 16(1), 43–52.
- Putri, Z. M., Ani, R. S., & Duriyat, M. (2024). Proses politik dalam perumusan kebijakan publik dan pendidikan sebagai kekuasaan. *ECOEDU: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 112–126. <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/ecoedu/article/view/8127>
- Rahmawati, N. N. (2016). *Metode pembelajaran dalam pendidikan kritis transformatif perspektif muhammad karim dan relevansinya dengan pendidikan islam*. 1–109.
- Riddle, S. (2024). *Toward schools as sites of radical democratization: New possibilities for democratic education* (pp. 17–30). <https://doi.org/10.1002/9781119985280.ch2>
- Siri, T. A., Sesfao, M., & Usboko, W. C. (2024). Pembekalan tentang kurikulum Merdeka Belajar bagi guru dan tenaga kependidikan Katolik se-Paroki Wini dan Wekfau di Keuskupan Atambua. *Perigel*, 3(3), 41–51. <https://doi.org/10.56444/perigel.v3i3.2366>
- Suhaila, Q. F., Rangkuti, W. A., Izzati, N., Manurung, M., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Pemikiran Politik Islam*. 5(3), 11948–11961.
- Ulum, K. (2024). Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia pasca reformasi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 12(1), 55–70. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/9274>

Xu, W. (2023). *Paulo Freire on democratic education* (pp. 90–107). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009071536.009>